

**PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK
PENANAMAN MODAL SEBAGAI PEMBERDAYAAN NAGARI
DI SUMATERA BARAT**

DISERTASI

**Diajukan untuk memperoleh derajat Doktor Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Diajukan Oleh :

ZEFRIZAL NURDIN

BP : 1131203004

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

LEMBARAN PERSETUJUAN

PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK
PENANAMAN MODAL SEBAGAI PEMBERDAYAAN NAGARI
DI SUMATERA BARAT

Oleh :

ZEFRIZAL NURDIN
BP : 1131203004

KOMISI PEMBIMBING

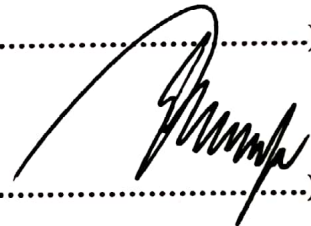
1. Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA
(Promotor)

(.....)



2. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum
(Ko-Promotor)

(.....)



3. Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn
(Ko-Promotor)

(.....)

Disetujui :

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas



Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH.

NIP. 196006251986031003

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Keaslian Penelitian	25
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	29
G. Metode Penelitian.....	35
BAB II. HAK ULAYAT DAN PENANAMAN MODAL	
A. Pengertian, Kekuatan dan Substansi Hak Ulayat	41
B. Subyek dan Obyek Hak Ulayat	45
C. Pengaturan Hak Ulayat dalam Hukum Nasional.....	49
D. Konsepsi Hak Ulayat dalam Persekutuan Matrilineal.....	63
1. Jenis-Jenis Hak Ulayat	63
2. Paradigma Klasik atas Hak Ulayat	70
3. Pola Pewarisan Hak Ulayat	84
E. Investasi sebagai Suatu Keniscayaan.....	85
1. Pro dan Kontra atas Investasi	85
2. Pengaturan Investasi di Indonesia.....	93
3. Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Perkebunan.....	109
4. Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Pertambangan	136
5. Tanah Ulayat Untuk Pengadaan Tanah Terkait Kepentingan Umum...	153
6. Hubungan Hukum dalam Kegiatan Investasi	174
a. Norma Sebagai Dasar Berbuat.....	174

b. Hubungan Hukum Stakeholders.....	181
BAB III. PENGATURAN UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN	
KEMAKMURAN MASYARAKAT ADAT	
A. Arti Penting Pembentukan Peraturan	221
B. Asas-asas dan Proses dalam Pembentukan Peraturan	224
C. Pembentukan Peraturan Sebagai Alat untuk Memakmurkan Masyarakat	
Adat selaku Penguasa Tanah Ulayat	239
1. Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	239
2. Beragam Sistem Hukum dalam Pembentukan Hukum	242
BAB IV. PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK	
KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL DI SUMATERA BARAT PADA	
MASA ORDE BARU	
A. Kekosongan Payung Hukum Atas Tanah Ulayat.....	250
B. Kiat Daerah dalam Menghadapi Arus Sentralistik.....	262
BAB V. PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK	
KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL DI SUMATERA BARAT PADA	
MASA REFORMASI	
A. Produk Hukum Daerah pada Masa Reformasi.....	272
B. Merespon Pluralisme Hukum	286
BAB VI. POLA HUBUNGAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH	
ULAYAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN NAGARI	
A. Hubungan Hukum Stakeholders	344
1. Kanagarian Tapan dan Kanagarian Lunang Kabupaten	
Pesisir Selatan.....	344
2. Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kabupaten Solok	359
3. Nagari Sundata Kabupaten Pasaman	381
B. Intervensi Pemerintah Daerah Pada Hubungan Hukum.....	385
BAB VII. PENUTUP	
A. Kesimpulan	419
B. Saran	422
DAFTAR PUSTAKA.....	425